

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

Siswanto

Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan

Email: siswanto_1978@yahoo.co.id

Abstrak: Globalisasi selain membuka peluang bagi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) untuk mengembangkan potensinya juga merupakan tantangan agar bisa eksis di tengah perubahan. Pada perkembangan selanjutnya, terdapat kecenderungan baru untuk merespon berbagai tuntutan dan tantangan tersebut, antara lain menyangkut: *pertama*, tuntutan akan studi keislaman yang mengarah pada pendekatan *non-madzhabi*, sehingga menghasilkan pemudaran sektarianisme. *Kedua*, menyangkut pergeseran dari studi keislaman yang bersifat normatif ke arah yang lebih historis, sosiologis dan empiris. *Ketiga*, menyangkut orientasi keilmuan yang lebih luas. Maka dari itu, PTAIN perlu dikembangkan di atas pilar pengembangan fungsionalitas-etik-akademik, dan pengembangan fungsionalitas-etik-teknologik.

Kata kunci: Kelembagaan, PTAIN, fungsionalitas-etik-akademik, fungsionalitas-etik-teknologik

Abstract: Globalization opens the opportunity for the State Islamic University (PTAIN) to develop their potential and challenge be exist in the midst of change. It is a new tendency to respond to the demands and challenges, among others: firstly, accomodating Islamic studies that lead to non-madzhabi approach resulting in fading sectarianism. Secondly, regarding the shifting paradigm from normative Islamic studies towards a more historical, sociological and empirical. Thirdly, broading scientific orientation. Therefore, PTAIN should be developed on the pillars of ethical-academic-functionality development, and developing ethical-technologic-functionality.

Keywords: institution, PTAIN, functional-ethical-academic, functional-ethical-technology

Pendahuluan

Sedikitnya ada dua kecenderungan yang bisa diidentifikasi dengan zaman globalisasi. *Pertama*, semakin kuatnya dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi “malaikat imajinatif” kreativitas dan produktifitas, mampu merekayasa apa saja semaksimal mungkin bagi kepentingan hidup manusia. Tak satu pun kekayaan alam bisa dieksplorasi, dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh manusia kecuali dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara sempurna. Manusia berpretensi positif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya.¹

Kedua, kuatnya dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi pelan-pelan menggeser nilai-nilai luhur yang secara universal dijunjung tinggi oleh manusia. Nilai-nilai kemanusiaan, budaya, dan agama mengalami alienasi baik pemahaman, pelestarian, maupun aplikasinya. Hampir mayoritas pemerhati sosial dan keagamaan sependapat bahwa globalisasi dan teknologi menyebabkan bergesernya nilai baik-buruk di masyarakat.²

Dalam konteks globalisasi yang melanda masyarakat tersebut, selain membuka peluang-peluang besar bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan potensinya juga merupakan tantangan bagaimana perguruan tinggi bisa eksis di tengah perubahan tersebut.³ Perubahan masyarakat terjadi karena adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses globalisasi yang demikian cepat yang ditopang dengan perkembangan industri menuntut pengembangan dan inovasi-inovasi baru guna melahirkan para ilmuwan yang memiliki kemampuan akademik dan analitik-saintifik jelas memerlukan jawaban konkrit lembaga pendidikan tinggi.⁴

¹Imam Tholikhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.100.

²Ibid.

³Mudjia Rahardjo, “Universitas Islam Negeri (UIN) Malang di Tengah Perubahan Global”, dalam ed. M. Zainuddin dan Muhammad In’am Esha, *Horizon Baru Pengembangan Pendidikan Islam (Upaya Merespon Dinamika Masyarakat Global)* (Malang: UIN Press, 2004), hlm. 129.

⁴Arief Furchan, *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia, Anatomi Keberadaan Madrasah dan PTAI* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 132-133.

Mencermati perkembangan keilmuan di atas, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan motor penggerak utama arus globalisasi, maka peran yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sangat jelas, yakni memiliki kemampuan sains dan teknologi yang handal. Karena itu, dengan terus mengikuti secara seksama perubahan dan kecenderungan serta kebutuhan masyarakat dewasa melahirkan sosok lulusan handal secara utuh harus menjadi tema besar visi pengembangan PTAIN. Tema besar pengembangan PTAIN yang menjadi bahan telaah bersama harus menjangkau ke masa depan (*futuristik*), yakni harus mampu mempersiapkan lulusan yang sanggup hidup dan memikul tugas dan tanggung jawab masa depan yang sangat besar.

Hal ini perlu dipahami oleh semua pihak, mengingat secara sosiologis, pendidikan senantiasa merupakan penjelmaan dari fenomena sosial yang sedang dan selalu bergerak. Menguatkan temuan Emile Durkheim, Malik Fajar menegaskan bahwa menelaah bidang pendidikan harus selalu mendudukan permasalahannya dalam masyarakat yang lebih luas, terutama dalam mencermati pergumulan, orientasi dan pemikiran yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Sebab kondisi obyektif masyarakat pada gilirannya akan terejewantahkan dalam jejak langkah perguruan tinggi yang dibangunnya. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keniscayaan jika pengelolaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikannya harus selalu dilakukan *reform, change, dan growth* secara terus menerus dan berkesinambungan.⁶

Diakui memang bahwa saat ini telah terjadi perubahan besar dalam kehidupan umat manusia, tidak saja dalam lapangan sosial budaya, sains dan teknologi, bahkan juga dalam lapangan agama. Hal ini dapat dicermati dari telah diterimanya secara langsung atau tidak akan budaya pragmatis-hedonisme di lingkungan masyarakat. Budaya seperti itu akan tampil dalam bentuk jawaban akan pertanyaan seperti apa manfaat yang cepat dirasakan, baik dalam bentuk finansial maupun kesenangan yang akan diraih atau dijanjikan

⁵A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm. 98-99.

⁶Imam Suprayogo, *Universitas Islam Unggul, Refleksi Pengembangan Kelembagaan dan Reformulasi Paradigma Keilmuan Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 62.

bila melakukan suatu pekerjaan. Pertanyaan-pertanyaan senada seperti itu tentunya sangat terbuka dialamatkan ke PTAIN sebagai wadah pencetak sumber daya manusia yang banyak memakan investasi, baik waktu, tenaga dan uang. Bila jawaban terhadap pertanyaan itu, “negatif”, tentunya PTAIN akan sangat mudah ditinggalkan oleh masyarakatnya, atau paling *banter* dinilai sebagai pilihan kedua setelah pertama tidak dapat dicapai.⁷

Namun, hal yang harus disadari oleh para pengembangan perguruan tinggi Islam adalah menampilkan lembaga pendidikan yang bukan hanya menjawab tuntutan masyarakat terhadap urgensi pendidikan agama, tetapi juga harus mengantisipasi kecenderungan masyarakat dalam mempertimbangkan untung-rugi, baik dengan takaran moral maupun materi, juga relevansinya dengan ketenagakerjaan.⁸

Pada sisi lain, sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian diikuti peraturan perundangan lainnya,⁹ telah terjadi perubahan paradigma madrasah dari sekolah agama menjadi sekolah umum berciri khas agama Islam. Perubahan paradigma ini berdampak terhadap kurikulum madrasah. Sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam, kurikulum madrasah--dalam semua jenjang--minimal setara dengan mata pelajaran sekolah umum ditambah mata pelajaran

⁷Amril M., “Pendidikan Tinggi Islam dalam Perspektif Dunia Kontemporer (Sebuah Reformulasi Aksi Akademis IAIN Menuju UIN)” dalam Muhmidayeli, *Membangun Paradigma Pendidikan Islam* (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2007), hlm. 94.

⁸Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, hlm. 111.

⁹Peraturan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990 tentang Pendidikan Dasar (pasal 4 ayat 3) menyatakan : “Sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah” ; SK Mendikbud Nomor 489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum (pasal 1 ayat 6) menyatakan bahwa : “Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama; Keputusan Menteri Agama Nomor 370/1993 tentang Madrasah Aliyah, sebagai tindak lanjut dari SK Mendikbud Nomor 489/U/1992, yang menegaskan posisi Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam.

agama.¹⁰ Dengan kurikulum yang didominasi mata pelajaran umum, madrasah tidak lagi memerlukan guru agama dalam jumlah besar, tetapi lebih membutuhkan guru-guru bidang studi umum seperti biologi, kimia, fisika, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.¹¹

Kebutuhan ideal guru-guru bidang studi umum di madrasah agak berbeda dengan di sekolah. Di madrasah, yang sangat dibutuhkan adalah guru-guru bidang studi umum berwawasan Islam. Mengapa? Kompetensi ganda ini diperlukan agar guru-guru bidang studi umum bisa mengajarkan materi pelajaran umum bernuansa Islam, khususnya pada pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris (*mafikkib*). Upaya ini dilakukan di samping untuk memperkuat ciri khas Islam di madrasah pasca kian “tersingkirnya” pelajaran agama, juga untuk menopang “proyek” reintegrasi ilmu agama dan ilmu umum ke dalam bingkai Islam.¹²

Untuk memenuhi kebutuhan guru-guru umum dimaksud, tidak bisa diharap dari lulusan perguruan tinggi umum karena lembaga ini tidak menyiapkan lulusan sebagaimana dibutuhkan madrasah. Hanya Fakultas/Jurusan Tarbiyah yang bisa menyiapkannya, baik melalui jurusan tadrís di IAIN/STAIN atau jurusan umum di UIN. Inilah peluang yang bisa diisi oleh lulusan jurusan umum IAIN/STAIN, khususnya jurusan tadrís. Peluang ini sangat terbuka mengingat pendirian madrasah dalam semua jenjang akhir-akhir ini semakin meningkat seiring kian membaiknya perhatian pemerintah terhadap pengembangan pendidikan Islam.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka sesungguhnya pengembangan jenis keilmuan di PTAIN bisa dilakukan secara leluasa. Jenis program studi yang dipilih untuk dikembangkan tergantung pada kebutuhan masyarakat atau daerah yang bersangkutan, ketersediaan tenaga pengajar serta sarana pendukung, seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Dengan demikian, PTAIN diharapkan memiliki kawasan yang lebih luas, dan

¹⁰Lihat Keputusan Menteri Agama Nomor/1992 tentang kurikulum madrasah.

¹¹Mohammad Kosim, “Tantangan dan Peluang Jurusan Tadrís di STAIN/IAIN”, dalam *Tadrís, Jurnal Pendidikan Islam* (Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan, Vol.4 No.1, 2009), hlm. 67-68.

¹²Ibid., hlm. 68.

hal ini sejalan dengan pandangan Islam itu sendiri yang memiliki lingkup yang luas dan komprehensif, bahwa dalam membangun manusia tidak saja sebatas pengembangan aspek intelektual, melainkan juga spiritual, sosial, dan profesional sekaligus.

Perkembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri

Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) merupakan mata rantai dari sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Sejak awal abad ke-20 Masehi, masyarakat dan tokoh-tokoh organisasi Islam mempunyai kesadaran kolektif, tentang betapa pentingnya mendirikan PTAIN.

Membicarakan pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Indonesia, maka tidak bisa dilepaskan dari sejarah lahirnya Sekolah Tinggi Islam (STI) pada awal tahun 1945, yakni ketika Masyumi memutuskan untuk mendirikan sekolah tinggi tersebut di Jakarta. Ini berarti bahwa pendirian perguruan tinggi Islam pertama di Indonesia, dipelopori oleh golongan reformis atau para pembaru pendidikan Islam.

Diakui bahwa atas bantuan pemerintah Jepang, STI akhirnya dapat dibuka secara resmi pada tanggal 27 Rajab 1364 H, bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945 M, di Jakarta.¹³ Pada awalnya, STI didirikan untuk melatih ulama atau intelektual muslim untuk mempelajari Islam secara lebih meluas dan mendalam serta memperoleh standar pengetahuan umum yang memadai sebagaimana tuntutan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai tujuan didirikannya STI, yang pada dasarnya merupakan kebutuhan umat Islam Indonesia akan adanya perguruan tinggi yang memberikan pelajaran dan pendidikan tinggi tentang ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu kemasyarakatan, agar menjadi penyiaran agama dan memberikan pengaruh Islam di Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas serta keluasan jangkauan STI, maka muncullah ide untuk mengubah STI menjadi universitas. Tindak lanjut dari keinginan tersebut, dibentuklah suatu panitia perbaikan STI pada bulan November 1947. Keputusan penting dari

¹³Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.121.

kepanitiaan ini adalah mengubah STI menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) dengan membuka empat fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi.¹⁴

Dalam perkembangan berikutnya, fakultas agama UII ini dinegerikan, sehingga ia terpisah dari UII menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Tujuan PTAIN adalah untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam dan untuk tujuan tersebut diletakkan asas untuk membentuk manusia susila dan cakap serta mempunyai keinsyafan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia umumnya atas dasar Pancasila, Kebudayaan, Kebangsaan Indonesia dan kenyataan.¹⁵

Di samping tujuan ideal di atas, dibentuknya PTAIN tidak luput dari tujuan praktis, yaitu untuk memenuhi dan mengatasi kekurangan tenaga ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Dapat dimaklumi bahwa ketika itu telah banyak lulusan tingkat menengah sekolah atau masyarakat yang belum tersalurkan minat studi mereka ke tingkat perguruan tinggi disebabkan lembaganya sebelum berdiri PTAIN belum ada. Selain dari itu, kebutuhan tenaga ahli dalam bidang agama yang dapat menyahuti perkembangan zaman amat diperlukan dalam rangka membangun Indonesia yang baru merdeka. Selain itu, PTAIN diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman di Indonesia.¹⁶

Untuk lebih memperluas bidang kajian yang dapat dipelajari, maka perubahan atau transformasi kelembagaan dari PTAIN ke bentuk baru perlu dilakukan, tanpa melanggar aturan perundang-undangan. Dengan perkembangan tersebut dirasakan bahwa tidak mampu menampung keluasan cakupan ilmu-ilmu keislaman tersebut

¹⁴Perubahan status dari sekolah tinggi menjadi universitas merupakan fenomena menarik, terutama jika dilihat dari fakultas-fakultas umum (ekonomi, hukum, dan pendidikan). Dengan perubahan tersebut di atas, tujuan yang semula dimaksudkan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi para calon ulama, akhirnya bergeser titik tekannya pada (menurut sebagian pandangan) fakultas-fakultas non agama yang bersifat "sekuler", namun tetap berlandaskan nilai-nilai agama Islam.

¹⁵Ibid., hlm. 122-123.

¹⁶Ibid., hlm.123.

kalau hanya berada di bawah satuan payung fakultas saja. Dari gagasan ini, para tokoh-tokoh Islam bermaksud untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memperluas lembaga PTAIN dalam bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN).¹⁷

Pada tanggal 24 Agustus 1960, menteri agama (Wahib Wahab) meresmikan pembukaan IAIN di Yogyakarta. PTAIN Yogyakarta diubah menjadi Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syariah, sedangkan ADIA Jakarta diubah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab. Jadi, Pendirian IAIN tersebut merupakan hasil integrasi PTAIN (1950) di Yogyakarta dan ADIA (1957) di Jakarta. Ide penggabungan kedua lembaga ini berawal dari keinginan tokoh-tokoh Islam untuk memperluas jangkauan perguruan tinggi Islam yang telah ada dengan pertimbangan:

1. Luas dan dalamnya ruang lingkup ilmu pengetahuan agama Islam tidak memungkinkan untuk ditampung, dikaji dan dikembangkan dalam satu wadah fakultas saja;
2. Semakin meningkatnya kebutuhan serta tuntutan masyarakat dan pemerintah terhadap penyediaan tempat dan fasilitas belajar dalam lingkungan perguruan tinggi agama Islam di satu pihak dan sangat terbatasnya kesempatan yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi seperti PTAIN dan ADIA di pihak lain;
3. Semakin bertambahnya kebutuhan akan tenaga ahli yang terampil, secara kuantitatif dan kualitatif, dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁸

Dengan demikian, keinginan untuk mendirikan IAIN pastilah bukan hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan ideologis (keagamaan) semata, tetapi juga menyangkut aspek politis dan sosiologis. Pada pasal dua peraturan Presiden No.11 tahun 1960, tentang pembentukan IAIN dikemukakan, bahwa tujuan instruksional IAIN yaitu untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu

¹⁷Ibid., hlm.125.

¹⁸Tim Penyusun, *Kebijakan Departemen Agama dari Masa ke Masa dalam Kurun Setengah Abad* (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1996), hlm. 42-43.

pengetahuan tentang agama Islam. Hal ini tidak jauh berbeda dengan tujuan PTAIN. Berdasar tujuan ini, maka program pendidikan yang diselenggarakan di IAIN adalah program/jurusan agama. Hanya, ketentuan ini tidak selamanya diikuti. Buktinya sejak awal IAIN (khususnya Fakultas Tarbiyah) telah membuka jurusan umum yang mestinya menjadi garapan perguruan tinggi umum.¹⁹

Lebih lanjut, pada tanggal 25 Februari 1963, Menteri Agama mengeluarkan SK No. 49 tahun 1963, tentang pemisahan IAIN menjadi dua Institut yang berdiri sendiri. Pertama berpusat di Yogyakarta dengan nama IAIN Sunan Kalijaga. Kedua berpusat di Jakarta dengan nama IAIN Syarif Hidayatullah. Dari kedua kota inilah, IAIN dengan cepat berkembang ke daerah-daerah di nusantara. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bertugas mengkoordinir dan membina fakultas-fakultas hingga berdiri sendiri menjadi IAIN di wilayah timur, meliputi Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Sedangkan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertugas mengkoordinir dan membina fakultas-fakultas hingga berdiri sendiri menjadi IAIN di wilayah barat, meliputi Jakarta Raya, Jawa Barat, dan Sumatera.

Sampai dengan tahun 1972, telah berdiri 14 buah IAIN dengan cabangnya masing-masing yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 1997 berdasarkan Keputusan Presiden, Cabang-cabang IAIN secara administrasi dan manajemen dipisahkan dari induknya dan berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang otonom.²⁰

Perkembangan berikutnya, pada awal tahun 2002, berdasarkan Peraturan Presiden, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta berubah status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Pada tahun 2004, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, STAIN Malang, dan IAIN Sutan Syarif Qasim Riau, juga berubah Status menjadi UIN. Kemudian pada tahun 2005, IAIN Alauddin Makassar dan IAIN Sunan Gunungjati Bandung, juga berubah Status menjadi UIN. Pada Tahun 2013 IAIN Sunan Ampel

¹⁹Mohammad Kosim, "Tantangan dan Peluang Jurusan Tadris di STAIN/IAIN", dalam *Tadris, Jurnal Pendidikan Islam* (Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan, Vol.4 No.1, 2009), hlm. 58.

²⁰Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), hlm. 56-57, 72.

Surabaya dan IAIN Ar-Raniry Aceh juga telah menjadi UIN. Artinya, di Indonesia dewasa ini, terdapat delapan UIN. Kedelapan UIN di Indonesia membuka beberapa fakultas baru dengan sejumlah program studi (prodi) umum atas izin operasional Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kecenderungan masyarakat mendaftar di UIN tampak semakin tinggi dari tahun-ke tahun, baik pada prodi agama maupun prodi umum.

Imam Suprayogo - mengutip pendapat Azyumardi Azra - mengemukakan bahwa ada beberapa landasan kuat mengapa STAIN/IAIN harus berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), yaitu:

1. Untuk memberikan peluang penataan pendidikan tinggi yang lebih luas pada tamatan madrasah. Hal ini terjadi karena berubahnya IAIN menjadi UIN akan bertambah jumlah fakultas dan program studi yang berdampak pada penambahan jumlah mahasiswa yang akan diterima.
2. Agar tamatan-tamatan UIN dapat memasuki dunia lapangan kerja yang lebih luas. Hal ini terjadi karena dengan dibukanya fakultas-fakultas umum di samping fakultas agama yang telah ada, tamatan UIN tidak hanya dapat bekerja di lembaga-lembaga keagamaan seperti Departemen Agama, madrasah dan pesantren, melainkan juga dapat bekerja di berbagai sektor seperti perbankan, perusahaan industri dan jasa, serta berbagai sektor yang lebih luas lainnya.
3. Agar UIN dapat menampung tamatan Madrasah Aliyah yang keadaannya sudah berubah menjadi Sekolah Menengah Atas bercorak keagamaan. Karena, diketahui bahwa sejak tahun 1994 telah terjadi perubahan pada kurikulum Aliyah dari yang semula sebagai kurikulum untuk sekolah menengah keagamaan menjadi kurikulum SMA yang bercorak keagamaan. Sehingga lulusan MA sudah tidak lagi sama dengan lulusan-lulusan MA pada tahun-tahun sebelumnya. Jika lulusan MA sebelumnya yang bercorak sekolah agama sangat cocok masuk ke IAIN maka setelah terjadi perubahan kurikulum tersebut, tamatan Aliyah tersebut sudah tidak cocok lagi masuk IAIN.
4. Untuk meningkatkan martabat perguruan tinggi Islam yang berada di bawah Departemen Agama sehingga sejajar dengan martabat perguruan tinggi umum yang berada di bawah naungan

Departemen Pendidikan Nasional dan jika memungkinkan lebih tinggi lagi. Karena perguruan tinggi Islam seperti STAIN/IAIN masih diposisikan sebagai perguruan tinggi kelas dua dan dimarginalkan atau dilihat sebelah mata.²¹

Dengan demikian, kehadiran UIN dengan visi integrasi ilmu dan peradaban, dapat memperluas dan memperluwes pemahaman pebelajar dalam mengkaji Islam yang ajarannya bermuara pada "*rahmah li al-'âlamîn*" dan keselamatan ukhrawi.

Saat ini, perkembangan kuantitatif Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) menunjukkan jumlah yang cukup signifikan dan tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, yaitu terdiri dari 32 STAIN dengan jumlah program studi sebanyak 241 buah; 12 IAIN dengan jumlah program studi sebanyak 262 buah; dan 8 UIN dengan jumlah program studi sebanyak 225 buah.²² Hanya saja, fenomena yang muncul kemudian adalah tampil-nya STAIN menjadi 'IAIN-IAIN kecil' lantaran pola pengembangan dan jumlah jurusan/program studi yang dimiliki STAIN sama dengan yang dilakukan oleh IAIN. Hal ini diduga problematis mengingat menurut peraturan perundang-undangan, Sekolah Tinggi hanya menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/ atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu, atau dalam konteks STAIN, yaitu lingkup ilmu pengetahuan agama. Berbeda halnya dengan institut dan universitas.

Faktanya, saat ini STAIN memiliki beragam program studi/ jurusan bahkan lebih jauh dari itu, membuka berbagai program studi umum, seperti Matematika, Biologi, dan Bahasa Inggris. Pasca pembukaan program studi umum tersebut, muncul berbagai tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat luas, terutama terkait dengan pemahaman mereka bahwa misi pendidikan tinggi Islam, termasuk STAIN di dalamnya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ke-Islaman. Jika STAIN membuka program studi umum, maka dimana akan diposisikan jenis ilmu agama Islam? Persoalan yang mengemuka adalah seputar orientasi, arah

²¹Imam Suprayogo dan Rasmianto, *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam, Refleksi Perubahan IAIN/STAIN menjadi UIN* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.12-13.

²²*Swara Ditperta*s, April 2006.

pengembangan, dasar kebijakan dan seterusnya, terkait dengan program studi tersebut. Misalnya, apakah program tersebut sekedar pemenuhan kebutuhan *ad hoc* bagi madrasah yang membutuhkan guru bidang studi umum, ataukah dapat dimasukkan sebagai *core* bidang ilmu ke-Islaman itu sendiri. Maka, dipandang penting, menggali adanya upaya mendasar dan strategis yang ditempuh STAIN dalam merekonstruksi paradigma keilmuan terkait dengan pengembangan program studi umum atau pada ranah praksis, seberapa jauh STAIN mendudukkan persoalan *construct* keilmuan agama dan umum dalam satu kesatuan (*integratif*) yang ideal dan mencerahkan.

Landasan Pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri

Berbagai program studi di PTAIN dikembangkan berlandaskan pada beberapa aspek sebagai fondasi pengembangan kelembagaan. Dengan menggunakan pandangan Muhaimin, di bawah ini akan diuraikan beberapa landasan tersebut, yaitu:²³

1. Landasan Normatif-Teologis

Dilihat dari aspek normatif-teologis, doktrin Islam pada dasarnya mengajarkan kepada pemeluknya untuk memasuki Islam secara *kâffah* (menyeluruh) sebagai lawan dari ber-Islam yang parsial. Islam yang *kâffah* menggarisbawahi terwadahnya berbagai aspek kehidupan dalam Islam.

Ajaran tersebut mengandung makna bahwa setiap muslim dituntut untuk menjadi aktor beragama yang *loyal*, *concern*, dan *commitment* dalam menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupannya, serta bersedia dan mampu berdedikasi sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dan bidang keahliannya masing-masing dalam perspektif Islam untuk kepentingan kemanusiaan.

Pengembangan PTAIN dengan demikian, bertolak dari suatu pandangan bahwa PTAIN merupakan wahana pengembangan pandangan hidup yang islami, untuk dimanifestasikan dalam sikap hidup dan keterampilan hidupnya selaras dengan minat, bakat,

²³Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 69-75.

kemampuan dan bidang keahlian masing-masing. Pandangan ini berimplikasi pada pendidikan Islam yang berorientasi pada peningkatan kualitas iman dan takwa atau bahkan *imâm* bagi orang bertakwa.

Takwa ini terwujud dalam dua sikap, yaitu *itbâ' syari'at Allâh* (mengikuti *fundamental doctrine* dan *fundamental values* yang tertuang dan terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah) dan sekaligus *itbâ' sunnah Allâh* (mengikuti aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang berlaku di alam semesta).²⁴

Pengembangan kedua sikap *itbâ'* yang diwujudkan dalam indikator sikap tersebut menuntut pengembangan berbagai program studi umum di PTAIN, yang tidak hanya terbatas pada bidang-bidang yang tercakup dalam *itbâ' syari'ah Allâh (islamic studies* dalam arti sempit), tetapi juga bidang-bidang yang tercakup dalam *itbâ' sunnah Allah (natural sciences, sosial sciences and humanities)*.

2. Landasan filosofis

Dilihat dari aspek filosofis, jika paradigma pendidikan Islam adalah sebagai upaya pengembangan pandangan hidup Islami yang diwujudkan dalam sikap hidup dan dimanifestasikan dalam keterampilan hidup sehari-hari, maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan bertolak dari suatu pandangan yang teosentris di mana konsep antroposentris merupakan bagian esensial dari konsep teosentris.

²⁴Sikap orang yang *itba' syari'at Allah* ditandai dengan: 1) senantiasa membaca dan memahami ajaran dan nilai-nilai Islam yang tertuang dan terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah; 2) berusaha menghayatinya sambil memposisikan diri sebagai pelaku ajaran Islam yang loyal, disamping sebagai pemikir, penalar dan pengkaji; 3) memiliki *personal commitment* yang tinggi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam; dan 4) siap berdedikasi dalam rangka menegakkan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan sikap *itba' sunnatillah* ditandai dengan: 1) senantiasa membaca dan memahami fenomena alam, fenomena fisik dan psikis, dan fenomena sosial-historis, serta fenomena lainnya; 2) memposisikan diri sebagai pengamat, pengkaji, sehingga memiliki daya analisis yang tajam, kritis, dan dinamis dalam memahami fenomena yang ada di sekitarnya; 3) senantiasa berusaha membangun kepekaan intelektual serta kepekaan informasi; dan 4) karena masing-masing orang mempunyai bakat, kemampuan dan minat tertentu, maka dalam *itba' sunnatillah* perlu disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing, sehingga terwujud kematangan profesional.

Kehidupan yang islami menggarisbawahi perlunya bangunan ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu pengetahuan yang tidak hanya meyakini kebenaran *sensual-inderawi*, *rasional-logik*, dan *etik insani*, tetapi juga mengakui dan meyakini kebenaran *transendental* dan kebenaran *intuitif*. Karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bersifat *value free*, tetapi *value bound*, dalam arti berada dalam *frame of work* yang merupakan realisasi dari misi kekhalifahan dan pengabdian kepada-Nya.

Atas dasar itu, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya mengajarkan “yang ada” (*existence*) yang dalam hal ini dapat disebut netral, tetapi juga mengajarkan “yang akan ada” (*will exist*), bagaimana menggunakan hakikat *universe* (alam semesta) dan hukum-hukumnya atau temua-temuan ilmu pengetahuan, serta bagaimana mengarahkannya ke arah tertentu (*aksiologis*). Dalam konteks ini, ada dua pilihan, yaitu pilihan Ilahi (kebenaran) atau pilihan manusiawi (hawa nafsu).

Pengembangan PTAIN, dengan demikian, bertolak dari konstruk pemikiran atau epistemologi bahwa yang vertikal (ajaran dan nilai-nilai ilahi) merupakan sumber konsultasi, sentral dan didudukkan sebagai *ayat*, *hudan*, dan *rahmah*. Sedangkan yang horizontal (teori, konsep dan temuan ilmu pengetahuan) berada dalam posisi sejajar yang saling menjadi *sharing ideas*, untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada ajaran dan nilai ilahi, terutama yang menyangkut *will exist* atau dimensi aksiologis.

3. Landasan Historik

Dilihat dari aspek historis, secara garis besar Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam tiga periode, yaitu: (1) Periode klasik²⁵ (dimulai tahun 650 - 1250 M), yakni sejak Islam lahir hingga kehancuran Baghdad. (2) Periode pertengahan (sejak tahun 1250 - 1800 M); sejak Baghdad hancur hingga munculnya ide-ide pembaruan di Mesir. (3) Periode modern (mulai tahun 1800 M-

²⁵Terminologi masa klasik ini membuka peluang untuk diperdebatkan, sejak dan hingga kapan?. Apakah dalam kaca mata dunia muslim atau penulis Barat. Sebab para penulis Barat mengidentikkan masa klasik abad ke-7 sampai 12/13 M sebagai zaman kegelapan (*dark age*), sementara para penulis muslim mengidentikkannya dengan masa keemasan (*al-Ashr al-dzahabiy*). Lihat Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.6.

sekarang).²⁶ Dalam realitas sejarahnya, periode klasik menggambarkan masa kejayaan, keemasan, atau kemajuan dunia Islam; periode pertengahan menggambarkan masa kemunduran dunia Islam; dan periode modern menggambarkan masa kebangkitan dunia Islam.

Dengan menyimak pengalaman historik tersebut, maka pengembangan berbagai program studi umum di PTAIN berusaha menangkap ibrah serta mengembangkan nilai-nilai, sikap, cara berpikir dan berperilaku ulama' pada periode klasik tersebut, karena hal itu dianggap mampu menghadapi tantangan yang makin banyak dan ruwet, yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek dan perubahan sosial yang begitu pesat. Sebagai implikasinya, sistem pendidikan yang dibangun dan dikembangkan merupakan perpaduan yang sistematis dan integral antara *itbâ' syari'ah Allah* dan *itbâ' sunnah Allah* dalam struktur kurikulumnya, sehingga diharapkan mampu menghasilkan ulama' yang bersikap rasional dan profesional, berpandangan luas, berbudi pekerti luhur, pengetahuannya tidak terbatas pada ilmu keagamaan saja, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan umum serta mampu berdiri sendiri (mandiri).

Pilar-pilar Pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri

Berhadapan dengan tantangan modern abad ke-21, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) tentunya ditantang untuk mampu berperan secara optimal dalam membawa masyarakat ke abad informasi dan globasi dunia. Berbeda dengan kehadirannya pada beberapa tahun yang lalu, kini PTAIN tidak bisa lagi hadir hanya dengan cita-cita dakwah. Pada masanya, misi ini memang efektif, tetapi untuk sekarang jelas tidak cukup. Karena itu, diperlukan upaya

²⁶ Lihat babakan sejarah Islam pada Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Gerakan dan Pemikiran* (Jakarta: Bulan Bintang,1975), hlm. 11 dan juga Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, vol.1 (Jakarta: UI Press,1985), hlm. 56-91. Kemudian perinciannya dapat dibagi menjadi 5 masa, yaitu: (1) Masa hidup Nabi Muhammad saw. (571-632 M), (2) Masa *Khalifah al-Rasyidun* (632-661 M); (3) Masa kekuasaan Umayyah di Damsyik (661-750 M); (4) Masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad (750-1250 M); dan (5) Masa Jatuhnya kekuasaan khalifah di Baghdad tahun 1250 M sampai sekarang. Lihat Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 7.

untuk membangun visi baru yang tidak saja sejalan dengan cita-cita keagamaan, tetapi juga selaras dengan tradisi keilmuan dan seiring dengan konteks sosio-kultural yang dihadapi.²⁷

Kalau kita menengok aspirasi umat Islam dalam pengembangan PTAIN sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dalam konteks tersebut, di bidang pendidikan Islam dibutuhkan sebuah pendidikan unggulan dalam menyikapi arus perkembangan zaman tersebut. Menyikapi hal itu, PTAIN sebagai lembaga pendidikan lanjutan dari jenjang pendidikan Islam-madrasah dan pesantren perlu mewujudkan cita-cita itu. Karena PTAIN merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi yang memiliki ciri khas keislaman, yang membedakannya dengan perguruan tinggi umum lain.²⁸ Ciri keislamannya tidak hanya menjadikan Islam sebagai obyek kajian ilmiah, melainkan lebih dari itu, diharapkan suasana kampus PTAIN dan para civitas akademiknya juga mencerminkan kualitas akhlak dan perilaku Islami.²⁹

Maka dari itu, pada perkembangan selanjutnya terdapat kecenderungan-kecenderungan baru untuk merespon berbagai tuntutan dan tantangan yang berkembang di masyarakat. Beberapa kecenderungan tersebut antara lain menyangkut: *pertama*, tuntutan akan studi keislaman yang mengarah pada pendekatan *non-madzhabi*,

²⁷Imam Tholikhah, "Peran STAIN dalam Pendidikan Islam," dalam ed. Mudjio Rahardjo, *Quo Vadis Pendidikan Islam, Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan* (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm. 75.

²⁸Watak, corak, dan budaya akademik di kalangan Perguruan Tinggi Umum (PTU) ternyata berbeda dengan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN). PTU mengasuh berbagai ilmu pengetahuan umum, seperti ilmu kesehatan, teknik pertanian dan ekonomi. Ilmu-ilmu ini syarat dengan nilai-nilai ekonomi dan keteknoratisan dalam menjawab dan memecahkan berbagai masalah kehidupan, dan umumnya bernuansa duniawi. Sedangkan PTAIN lebih banyak mengasuh ilmu-ilmu agama sebagaimana tercermin dalam program/fakultas/jurusan yang dikembangkan (seperti Ushuluddin, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah dan Adab). Semuanya sarat dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, lebih kuat dengan nuansa *ukhrâwî*. Corak ilmu-ilmu yang dikembangkan PTAIN memiliki misi dakwah Islamiyah, menegakkan kebenaran, meniadakan kemungkaran, dan kebatilan. Para civitas akademiknya terpenggil untuk mengamalkan ilmu sebagai panggilan agama. Lihat Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm.51-52.

²⁹Said Aqil Husien al-Munawwar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 58.

sehingga menghasilkan pemudaran sektarianisme. *Kedua*, menyangkut pergeseran dari studi keislaman yang bersifat normatif ke arah yang lebih historis, sosiologis dan empiris. *Ketiga*, menyangkut orientasi keilmuan yang lebih luas.³⁰

Dalam konteks ketiga ini, pada dekade yang lalu, kajian yang berkembang di PTAIN sebagaimana tercermin dalam jurusan yang ada, lebih mengedepankan ilmu pengetahuan agama Islam dalam pengertian *al-'ulum al-naqliyyah (perennial knowledge)*. Pengembangan semacam ini dianggap kurang relevan lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan pembangunan nasional, karena hanya bersifat sektoral, hanya memenuhi satu sektor tertentu dalam kehidupan Islam di Indonesia, yaitu memenuhi kebutuhan akan sarjana-sarjana yang mendapatkan pengetahuan tinggi mengenai ajaran Islam. Sehingga dengan demikian, PTAIN dengan paradigma tersebut tidak memungkinkan untuk melahirkan manusia-manusia yang kompetitif dalam era globalisasi yang didominasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, PTAIN saat ini dituntut untuk dapat melahirkan manusia-manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan sekaligus hidup di dalam nilai-nilai agama (Islam), yang hal ini merupakan pilar-pilar dari masyarakat madani.³¹

STAIN/IAIN/UIN sebagai realitas lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri tentunya tidak lepas dari hukum gerak dan proses “menjadi”. Bahkan keberlangsungan eksistensi dirinya sangat tergantung seberapa jauh ia mampu merekayasa dirinya mengikuti perubahan dan perkembangan yang berlangsung dalam dinamika kehidupan sebagai implikasi dari hukum gerak dan perubahan tersebut.³²

Indikasi tampilnya kesadaran STAIN untuk mengembangkan dirinya – setidaknya sampai saat ini – telah mengambil ancang-ancang

³⁰Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam, dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 240.

³¹Ibid., hlm.241.

³²Anril M., “Pendidikan Tinggi Islam dalam Perspektif Dunia Kontemporer” dalam Muhmidayeli, et.al. *Membangun Paraigma Pendidikan Islam* (Pekanbaru: Pascasarjana UIN Suska Riau, 2007), hlm. 95.

untuk merekayasa dirinya agar dapat berperan lebih luas dan empatik terhadap masyarakat. Munculnya upaya transformasi PTAIN dengan membuka program studi baru “umum” menunjukkan tingginya kesadaran akan perlunya perubahan dan pengembangan di PTAIN yang selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakat global.

Pengembangan program studi umum di STAIN merupakan perwujudan dari keniscayaan untuk menyiapkan calon-calon sarjana muslim yang memiliki komitmen akademik religius dan profesional dan mampu berkompetisi. Karena itu, Kementerian Agama hendaknya merumuskan secara jelas tentang format pengembangan kelembagaan PTAIN berdasarkan kajian yang dilakukan secara komprehensif, khususnya dari perspektif epistemologi keilmuan, sehingga terdapat distribusi peran yang jelas di antara PTAIN yang ada di Indonesia dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan.

Istilah pengembangan dapat bermakna kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, bagaimana menjadikan program studi yang ada di suatu perguruan tinggi yang hanya dua atau tiga program studi dapat lebih meluas dan bertambah jumlahnya. Secara kualitatif, bagaimana menjadikan program studi yang ada menjadi lebih baik, bermutu dan lebih maju sejalan dengan selalu berada di depan dalam merespons dan mengantisipasi berbagai tantangan hidup dan kehidupan.

Berpikir pengembangan lembaga mengajak seseorang untuk berfikir kreatif dan inovatif dalam melakukan perubahan (*change*) sebagai akibat dari keprihatinan terhadap kondisi dan eksistensi program studi yang dikelola, yang diikuti dengan pertumbuhan (*growth*) dan pembaruan atau perbaikan (*reform*) serta ditingkatkan secara terus menerus (*continuity*) untuk di bawah ke arah yang lebih ideal.³³

Secara definitif, Baharuddin mengutip beberapa pendapat tokoh yang di antaranya adalah Megginson yang mengemukakan bahwa pengembangan adalah proses jangka panjang untuk menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki organisasi dan meningkatkan efektifitas kinerjanya. Sementara Handoko mengemukakan bahwa

³³Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam, dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 307.

pengembangan mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian. Sedangkan French menjelaskan bahwa pengembangan lembaga adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaharuan lembaga, terutama melalui manajemen budaya lembaga yang lebih efektif dan kolaboratif dengan tekanan khusus pada budaya tim-tim kerja formal dengan bantuan pengantar perubahan, katalisator dan penggunaan teori serta teknologi ilmiah terapan, mencakup riset kegiatan.³⁴

Dalam melakukan pengembangan, paling tidak ada dua pilar yang perlu digarap dalam pengembangan STAIN, yaitu:³⁵

1. Pengembangan Fungsionalitas-Etik-Akademik: Dialogis Normativitas Transendental dan Historisitas-Empiris *Verse*

Pengembangan pada pilar ini menuntut PTAIN untuk membuka diri dengan ilmu-ilmu umum yang lebih luas, sehingga kajian agama nantinya tidak saja hanya pada tataran normatif-transendental keagamaan *an sich*, akan tetapi juga menyentuh empiris-historis umat manusia. Model kajian keagamaan seperti inilah nantinya menjadikan norma-norma keagamaan tidak lagi bertahta pada tataran idealitas-kognitif, akan tetapi juga mengakar pada realitas empiris kehidupan nyata manusia yang senantiasa berkembang sesuai dengan historisitas kehidupannya. Dengan model kajian seperti ini pulalah kajian-kajian keagamaan akan tetap memberikan jawaban atas berbagai persoalan nyata yang dihadapi manusia itu sendiri, sehingga agama tidak lagi terpinggirkan dengan semakin derasnya rasionalisasi sebagai akibat kian majunya peradaban modern dan postmodern dengan sains dan teknologinya yang menjadikan agama kehilangan fungsionalitas dan integritas sosialnya.³⁶

³⁴Baharuddin, *Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam, Menuju Pengelolaan Profesional dan Kompetitif* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 98-99.

³⁵Amril M., "Pendidikan Tinggi Islam, hlm. 110-117.

³⁶Dalam studi sosiologis terdapat dua peran agama yang sangat signifikan dikembangkan. *Pertama*, peran sebagai *directive system*, yaitu agama ditempatkan sebagai referensi utama dalam proses perubahan. Dengan demikian, agama akan dapat berfungsi sebagai *supreme morality* yang memberikan landasan dan kekuatan

Menyadari akan pentingnya pemberdayaan agama saat ini, menjadikan kajian keilmuan di PTAIN sebagai lembaga pendidikan yang paling berkompeten mestilah mengikutsertakan ilmu-ilmu umum dalam keseluruhan kajian-kajian keislamannya, sehingga pesan-pesan normatif keislaman tidak lagi dipahami sebatas substantivitas-idealitasnya saja, tetapi mesti dipahami dari sisi eksistensialitas-fungsionalitas-empirisnya dalam kehidupan nyata, sehingga segala pesan-pesan norma imperatif kategoris dan hipotesis agama, baik melalui wahyu, hadits maupun hasil pemikiran ulama dapat terimplementasi dalam kehidupan nyata yang tidak lagi terisolasi dalam konsep-konsep normativitas-transendental agama saja.

2. Pengembangan Fungsionalitas-Etik-Teknologik: Rekonstruktif-Transformatif dan Pragmatis

Peningkatan pilar fungsionalitas-etik-teknologik mesti mendapat perhatian. Pengembangan pada pilar ini tidak hanya berorientasi pada pengisian lapangan kerja yang dapat dinikmati hasilnya, tetapi mesti diarahkan pada penciptaan lapangan kerja itu sendiri. Di samping itu, pengembangan kelembagaan ini seyogyanya dapat menjadi wahana atau wadah bagi pentransformasian sosial menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Untuk yang terakhir ini, menjadikan PTAIN nantinya sangat antisipatif dan korektif dengan dinamika kehidupan masyarakat, sehingga eksistensi PTAIN hidup dan memberi arti bagi pengembangan masyarakat. PTAIN akan terlepas sebagai lembaga

elit-spiritual masyarakat ketika mereka berdialektika dalam proses perubahan. Dengan pemaknaan semacam ini, agama tidak lagi dipandang sebagai penghambat perubahan seperti dalam filsafat materialisme. Pembahasan lebih lanjut lihat Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif* (Bandung : Mizan,1999). Berdasarkan upaya tersebut, agama menjadi daya dorong luar biasa bagi terciptanya perubahan ke arah coraknya yang konstruktif dan humanistik bagi masa depan umat manusia. *Kedua*, peran sebagai *defensive system*, agama menjadi semacam kekuatan resistensial bagi masyarakat ketika berada dalam lingkaran persoalan kehidupan yang semakin kompleks di tengah derasnya arus perubahan. Dalam konteks demikian, masyarakat akan mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mempertahankan diri dan tidak ada rasa kekhawatiran serta keraguan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Lihat Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik, Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan* (Yogyakarta: SI Press,1994), hlm. 121-122.

yang terasing di tengah-tengah masyarakat, sesuatu yang tidak diinginkan.³⁷

Mewujudkan peran PTAIN khusus seperti ini, paling tidak PTAIN ke depan mesti menjadikan dirinya secara lebih aktif, aplikatif dan kondusif sebagai instrumen dan rekayasa sosial dalam pengembangan PTAIN untuk masa depan mestilah melepaskan dirinya dari berbagai kepentingan internal kelompok tertentu, mengingat kondisi ini hanya akan menjadikan PTAIN tertutup dan eksklusif bagi pengembangan dirinya. PTAIN dalam hal ini mesti mampu membuka diri dan hanya menganut satu kepentingan, yakni mengorientasikan PTAIN semata-mata ke arah pentransformasian masyarakat yang lebih baik dalam kerangka Islam.³⁸

Maka dari itu, PTAIN mesti menjadikan dirinya sebagai lembaga rekayasa sosial yang transformatif-inklusif dan dinamis, sehingga segala bentuk sikap atomistik, isolatif dan eksklusif yang telah terlanjur tampil dalam kehidupan sosial keagamaan umat secara perlahan dapat dihilangkan. Inilah di antara peran sosial yang mesti dimainkan PTAIN ke depan yang sangat dinantikan masyarakat yang kian sarat dengan pluralitas sebagai ciri kehidupan modern dan kontemporer.

Guna pengembangan PTAIN ke depan, jati diri PTAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang berwatak Islami, maka dalam implementasi-operasi kinerjanya pada dua jalur pengembangan di atas secara metodologis dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan dialogis antara berpikir deduktif-normatif ke induktif-empiris, atau sebaliknya. Model pendekatan seperti ini, selain sangat memungkinkan tercapainya integrasi ilmu umum dan ilmu agama sebagaimana yang diharapkan, kendatipun baru dalam bentuk praktis-metodologis, juga menjadikan agama tetap fungsional dalam kehidupan umat manusia, terhindar dari ketersampingan oleh derasnya kemajuan sains dan teknologi. Melalui model ini pula, nilai-nilai spiritualitas keagamaan sebagai karakteristik dasar dalam agama tidak akan pernah tercerabut dari akarnya sebagaimana banyak

³⁷Amril M., "Pendidikan Tinggi Islam, hlm. 117.

³⁸Ibid.

dikhawatirkan oleh para ahli saat ini manakala agama ditelaah dari sudut kajian ilmu-ilmu umum yang berwatak empiris-rasionalistik.

Penutup

Pengembangan kelembagaan PTAIN merupakan peluang untuk merespon berbagai tuntutan dan tantangan yang berkembang dalam masyarakat global. Berbagai kekuatan global menggarisbawahi perlunya PTAIN untuk menyiapkan calon lulusan yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, produktif dan kompetitif, dengan tetap memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bersama dan kesadaran bersama dalam alam demokratis.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, pengembangan jenis keilmuan di PTAIN semestinya dilakukan secara lebih luas. Demikian pula jenis program studi yang dipilih untuk dikembangkan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, PTAIN diharapkan memiliki kawasan dan wawasan yang lebih luas, terutama dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komprehensif. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam bahwa dalam membangun manusia harus dilakukan secara komprehensif, yakni tidak saja sebatas pengembangan aspek intelektual, melainkan juga spiritual, sosial, dan profesional. *Wa Allâh a'lam bi al-Shawâb.**

Daftar Pustaka

- Baharuddin. *Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam, Menuju Pengelolaan Profesional dan Kompetitif*. Malang: UIN Maliki Press, 2011
- Daulay, Haidar Putra. *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Fadjar, A. Malik. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Fajar Dunia, 1999.

- Furchan, Arief. *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia, Anatomi Keberadaan Madrasah dan PTAI*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Keputusan Menteri Agama Nomor/1992 tentang kurikulum madrasah.
- Kosim, Mohammad. "Tantangan dan Peluang Jurusan Tadris di STAIN/IAIN", dalam *Tadris, Jurnal Pendidikan Islam*. Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan, Vol.4 No.1, 2009.
- M., Amril. "Pendidikan Tinggi Islam dalam Perspektif Dunia Kontemporer (Sebuah Reformulasi Aksi Akademis IAIN Menuju UIN)" dalam Muhmidayeli, *Membangun Paradigma Pendidikan Islam*. Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2007.
- Mastuhu. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Muhaimin. *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam, dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Nasution, Harun. *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Vol.1. Jakarta: UI Press, 1985.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Gerakan dan Pemikiran*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Rahardjo, Mudjia. "Universitas Islam Negeri (UIN) Malang di Tengah Perubahan Global", dalam ed. M. Zainuddin dan Muhammad In'am Esha, *Horizon Baru Pengembangan Pendidikan Islam (Upaya Merespon Dinamika Masyarakat Global)*. Malang: UIN Press, 2004.
- Suprayogo, Imam dan Rasmianto, *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam, Refleksi Perubahan IAIN/STAIN menjadi UIN*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Suprayogo, Imam. *Universitas Islam Unggul, Refleksi Pengembangan Kelembagaan dan Reformulasi Paradigma Keilmuan Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

- Suwendi. *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Swara Ditperta*s, April 2006.
- Tholkhah, Imam dan Ahmad Barizi. *Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Tholkhah, Imam. "Peran STAIN dalam Pendidikan Islam," dalam ed. Mudjio Rahardjo, *Quo Vadis Pendidikan Islam, Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan*. Malang: UIN Malang Press, 2006.
- Tim Penyusun, *Kebijakan Departemen Agama dari Masa ke Masa dalam Kurun Setengah Abad*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1996.
- Tobroni dan Syamsul Arifin. *Islam Pluralisme Budaya dan Politik, Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan*. Yogyakarta: SI Press, 1994.